



Rencana Kerja (RENJA) 2024

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

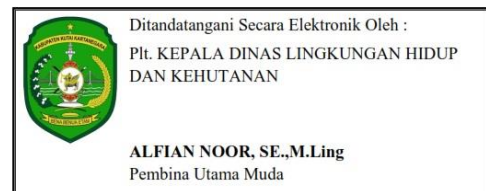
Kab. Kutai Kartanegara

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta yang terpenting adalah memuat mengenai evaluasi, analisis kinerja, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen kami untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Akhir kata semoga Rencana Kerja DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja –PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.....	22
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja –PD.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan.....	44
BAB V PENUTUP.....	56





BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja 2024 adalah dokumen hasil evaluasi rancangan awal, dan rancangan kerja yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan Renja ini merupakan hasil pembahasan atas usulan Program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang dan forum perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu : a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Perencanaan pembangunan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja 2024 Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup tentunya memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertical dan horizontal) maupun hubungan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang professional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Di dalam Rencana Kerja 2024 diuraikan mengenai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan pada tahun ke depan, visi dan misi bagi penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga memenuhi fungsi pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Selain itu juga menguraikan berbagai tujuan, sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penekanan diberbagai aspek pembangunan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :



*Rencana Kerja 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara*

*Page 2
Bab I Pendahuluan*



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/2015 Tentang Peran Masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodedikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023;





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.21 tahun 2012 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 yakni tersedianya suatu dokumen perencanaan Program, kegiatan dan anggaran untuk Tahun 2024 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat dijadikan acuan dan pegangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan seluruh stakeholder terkait pada tahun 2024 dalam melaksanakan pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan secara efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;

- b. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
- d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan dan sasaran perangkat daerah

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Renjana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja
OPD Tahun Lalu (2022) dan
Capaian Renstra Tahun 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

2.3 Isu-isu Penting dalam
Penyeenggaraan Tugas dan Fungsi
OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan
Awal RKPD/Renstra Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana

pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan tahun berjalan (2023) juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian Renstra.

Pada Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan (renstra) Perubahan 2021-2026.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target

Terhadap Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 8

Bab II Evaluasi Renja



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target

Adapun beberapa Program dan kegiatan yang memenuhi target diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH;
7. Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Pengelolaan Persampahan

2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja Program/kegiatan

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa Program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

1. Beberapa kegiatan terkait dengan rehabilitasi pemakaman bukan berada di kewenangan DLHK dan tidak dilakukan pemindahan anggaran Pokir oleh pemilik usulan.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2. Perencanaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan;
3. Target yang terlalu tinggi yang tidak dapat dikendalikan;
4. Proses penetapan TAHURA yang memakan waktu lama, terkait administrasi dan penebitan SK penetapan di TAHURA.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra perangkat Daerah merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Terhadap Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Bagi Program/ kegiatan yang tercapainya target berimplikasi kepada:
 - ✓ menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran udara, air maupun lahan;
 - ✓ Semakin banyak pelaku usaha yang tertib terhadap perturan perundang/undangan lingkungan hidup, terlihat dari PROPER
3. Terhadap Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
4. Tidak tercapainya target kinerja Program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagaimana terlampir.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TABEL T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																	
Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan (2023)		
											Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11	12 =(7+9+11)	13=(12/7)	
			2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	57,48	65,26	57,48	85	57,48	67,62	76,9	0	0
	2	11	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	56	22	10	10	100,00	9	2	9
	2	11	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	60	24	24	24	100,00	12	3	13
	2	11	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	10	10	2	4	4	100,00	4	0	0
	2	11	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	15	15	3	-	-	-	5	-	-
	2	11	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	5	1	-	-	-	1	-	-
	2	11	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	100	-	-
	2	11	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	60	60	24	12	12	100,00	100	5	21
	2	11	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	50,00	67,50	55,00	100,00	100,00	100,00	80,00	15,00	27,27



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 12

Bab II Evaluasi Renja



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

		2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	50	94,40	50,00	-	-	-	100,00	-	-
2	11	02	02	01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	Dokumen	2	19	3	-	-	-	100	-	-
2	11	02	02	02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS	Dokumen	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	-	1.000.000	2.694.818	-	-	-	200.000	-	-
2	11	03	02	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	-	20	4	1	1	-	1	-	-
2	11	03	02	02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	laporan	-	5	1	-	-	-	1	-	-
2	11	03	02	03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	-	5	1	-	-	-	-	-	-
		2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Persen	-	100	20	100	41,66	41,66	-	-	-
2	11	04	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Dokumen	-	5	2	-	-	-	1	-	-
						2. Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen	-	100,00	-	100,00	41,66	41,66	-	-	-
						3. Tercapainya Pengayaan Pengelolaan Kebun Raya	Persen	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

			2	11	05	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	-	18	4	-	-	-	4	-	-
2	11	05	2	01			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	Pelaku usaha	50	250	63	-	-	-	86	-	-
2	11	05	2	02			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	Pelaku usaha	50	250	15	7	7	100,00	3	-	-
			2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19,32	19,32	55,00	-	-	-	75,00	-	-
	2	11	06	01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	Persen	100	100	19	31	61	196,77	75	-	-
			2	11	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	-	72,22	55,00	-	-	-	40,00	-	-
2	11	07	02	01			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	-	72,22	67,00	-	-	-	40,00	-	-
2	11	07	02	02			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	Persen	-	70	-	-	-	-	-	-	-



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 14

Bab II Evaluasi Renja



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

			2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	Lembaga	35	175	35	13	13	100,00	100	-	-
2	11	08	02			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	kali	32	140	35	13	13	100,00	35	-	-
			2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/Kelurahan	-	21	-	-	-	-	-	-	-
							2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	Penghargaan	101	626	124	25	25	100,00	2	-	-
			2	11	09	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Jenis	1	10	2	25	25	100,00	2	-	-
			2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	100	100	88	100	100	100,00	78,5	-	-
2	11	10	2	01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Laporan	45	250	50	10	12	120,00	100	8	16







PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jika melihat dari evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022, Pagu 2022 senilai Rp 36.075.278.531,00 dengan tingkat realisasi sebesar 90,29% atau senilai Rp 32.573.163.043,00 dengan persentase pelaksanaan kegiatan 100 % dan Persentase Fisik pekerjaan 84,24 %. Dibandingkan dengan tahun 2021 capaian pelaksanaan fisik meningkat sebesar 26% dari 50,45% (tahun 2021) naik menjadi 84,24% di Tahun 2022. Terdapat Gap sebesar 15,76% Target Fisik Ditahun 2022 sehingga capaian tidak dapat dimaksimalkan 100%. Dari beberapa faktor penghambat capaian tersebut antara lain :

1. Belum selesainya proses penetapan Perda terkait Masyarakat hukum Adat ditahun 2022 sehingga, capaian penetapan masyarakat hukum adat mengalami kendala.
2. Kesalahan dalam menetapkan target Luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan pada tahap perencanaan yang terlalu tinggi.
3. Harga pasar yang mengalami kenaikan terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan harga yang tertera dalam dokumen perencanaan anggaran.
4. Target Pengurangan dan Penangan sampah yang belum dapat tercapai salah satunya karena waktu pelaksanaan yang kurang karena ada penambahan pagu di APBD Perubahan

Dalam tahun berjalan (2023) Pagu Anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp 34.384.065.478 dengan tambahan pagu dari Word Bank dalam Program FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) sebesar Rp 1.300.000.000,00 sehingga menjadi Rp 35.684.065.478,00. Sampai dengan semester 1 (satu) tahun 2023 Realisasi atas pagu telah terserap sebesar Rp 9.213.069.663,00 atau kurang lebih 26,79%. Adapun persentase serapan fisik sebesar 17,33% dan persentase pelaksanaan sebesar 43,27%





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel TC 30 berikut

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-		Proyeksi	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Penurunan Emisi GRK (CO ₂ EQ)	-	-	-	18.212,00	18.640,00	19.085,00	19.531,00	18.212,00	19.085,00	19.085,00	19.531,00
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	57,22	-	57,22	57,32	57,42	57,52	57,22	53,08	57,42	57,52
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	88,68	-	88,68	88,78	88,89	88,89	88,68	89,31	88,89	88,89
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	70,26	-	70,26	71,38	72,49	73,89	70,26	71,42	72,49	73,89
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	-	72,82	-	72,82	73,14	73,47	73,81	71,76	71,77	73,47	73,81
6	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	-	78,50	-	78,50	81,00	94,84	97,64	79,02	86,83	94,84	97,64
7	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	19,32	-	19,32	80,50	19,32	19,32	45,76	60,47	19,32	19,32





2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang serasi sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan bersama bagi generasi saat ini dan akan datang. Dengan demikian, setia pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya;
- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Apabila setiap pemanfaatan lingkungan hidup dapat mengacu kepada lima hal di atas maka lingkungan hidup akan selalu terjaga dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat, menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang dan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

papan serta permukiman. Disamping itu, kebutuhan sumber daya alam lainnya seperti tanah, air, energi, mineral dan lainnya dieksploitasi dari persediaan sumber daya alam di bumi.

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentingan manusia menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam dan berbagai permasalahan lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang dihadapi akibat pembangunan menyebabkan kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu lingkungan tersebut terutama berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*), maknanya secara ringkas adalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, konkretnya adalah bahwa setiap rencana, Program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Permasalahan lingkungan cukup rumit dan berdimensi luas seyoginya menjadi isu prioritas suatu daerah dan perlu intervensi mengatasi permasalahan tersebut karena menyangkut lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi dimana dampaknya tidak mengenal batas ruang/wilayah, diakibatkan oleh multi sector/multi pelaku dan permasalahan lingkungan ini dapat dirasakan akibatnya antar generasi.

Dalam penentuan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil metaplan, teridentifikasi tiga belas (13) isu utama permasalahan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

1. Eksploitasi sumber daya batubara secara terbuka (*open pit*) secara besar-besaran yang berakibat pada tingginya tingkat degradasi lahan.
2. Tingginya tingkat sedimentasi di kawasan tiga danau yaitu Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang.
3. Semakin rusaknya habitat di kawasan Delta Mahakam akibat sedimentasi dan abrasi.
4. Masih kurangnya kesadaran dan belum sebandingnya ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana dalam memberikan layanan kebersihan dibandingkan dengan timbulan sampah.
5. Fenomena iklim yang tidak menentu akibat terjadinya perubahan iklim secara global.
6. Tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sehingga sulit untuk memenuhi baku mutu.
7. Belum adanya kajian teknis terkait ketersediaan air menyambut penetapan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara bersama dengan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU).





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

8. Tingginya tingkat okupasi lahan di wilayah rencana Ibukota Negara khususnya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan menerapkan Program 3 R (*reuse, reduce, dan recycle*).
10. Semakin berkurangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.
11. Tingginya tingkat kebakaran hutan akibat kemarau yang berkepanjangan.
12. Semakin rusaknya habitat beberapa satwa endemik yang berpotensi terhadap semakin berkurangnya keanekaragaman hayati.
13. Potensi longsor disepanjang sempadan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya cukup tinggi.

Isu-isu strategis permasalahan lingkungan seperti tersebut di atas perlu adanya intervensi agar tidak menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya maka permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara bersama-sama sehingga perlu ditetapkan isu prioritas dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut. Isu strategis adalah isu yang sangat urgen dan mendesak untuk diintervensi dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Disebut sebagai isu prioritas atau isu strategis karena apabila tidak diantisipasi dan diperbaiki akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan isu prioritas/strategis ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

pemangku kepentingan di daerah. (sumber : Dokumen DIKPLHD DLHK Kab Kukar)

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja 2024 Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan langkah penyempurnaan terhadap rancangan awal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sejalan dengan itu RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi pprogram dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan , tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada Tahun 2024, Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodedikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun perubahan tersebut terjadi pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut :





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sub Kegiatan Awal	Pemutakhiran 19 Juni 2023
1	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
3	2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
4	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
5	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
6	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
7	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
8	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
		2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
9	Sub Kegiatan telah di non aktifkan. Silahkan mutakhirkan Sub Kegiatan anda 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
		2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
		2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan
		2.11.11.2.01.0010 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
		2.11.11.2.02.0001 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Terhadap hasil Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat beberapa evaluasi yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja 2024 antara lain :

1. Penambahan Sub Kegiatan Baru

Pada Rencana Kerja (Renja) 2024, Terdapat beberapa sub kegiatan baru yang sebelumnya pada Rancangan Awal belum dianggarkan antara lain :

- a. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*, Pengadaan pakaian Dinas Waskat dan Baju Putih, Pengadaan baju terakhir dilakukan di tahun 2018.
- b. *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*, Tindak lanjut dari perjanjian kinerja Esselon II butir ke 14 "Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun.
- c. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*, Pengadaan Gelas, Teko, Dispenser, piring untuk fasilitas kegiatan rapat dalam rangka pembatasan penggunaan sampah kertas dan plastik
- d. *Penyediaan Bahan/Material*, Untuk Mendanai Kegiatan Pameran Merah Putih, Pameran Erau, Pameran Pelaksanaan Lingkungan Tingkat Kabupaten dan Nasional
- e. *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*, Sesuai Instruksi Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-820/DIARPUS/45.1/02/2020 untuk menganggarkan terkait dengan kearsipan, tahun 2022 tidak ada penganggaran dan nilai kearsipan DLHK masih di kategori "C kurang".





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- f. *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Pengembangan Website Perangkat Daerah dengan menambah Fitur update data dan pembuatan Aplikasi Pembayaran pengujian Sample pada UPTD Laboratorium*
- g. *Pengadaan Mebel, Kondisi Meja Kerja, Kursi yang rusak berat dan bertambahnya jumlah ASN yng tidak sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada*
- h. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan AC, Televisi dan video conference, sound system (sesuai dengan identifikasi barang rusak berat)*
- i. *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, Sesuai dengan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum tanggal 20 Maret 2023, Penganggaran Pembangunan Gedung Kantor di Anggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kutai Kartanegara, yang dianggarkan DLHK hanya biaya Sewa Gedung Kantor*
- j. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional sebanyak 5 unit karena 2 kendaraan dinas operasional dalam kondisi Rusak.*
- k. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- l. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD*, pada perubahan 2023 akan dianggarkan pembiayaan Penyusunan KLHS RPJMD Perubahan, jika dianggarkan pada perubahan 2023 tahapan pelaksanaan KLHS RPJMD tidak bisa selesai di 2023, sehingga tahapan selanjutnya akan dianggarkan di 2024.
- m. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, dari rancangan awal RKPD pada program ini terjadi peningkatan pagu sebesar 38 %, kenaikan pagu ini berasal dari sub kegiatan pengelolaan Laboratorium Lingkungan di mana Penambahan untuk pengadaan peralatan uji laboratorium untuk penambahan parameter dan peningkatan kapasitas tenaga analis laboratorium.
- n. Pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)*, tambahan pagu senilai Rp 250.000.000 terdapat pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan hasil pembahasan dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- o. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Total Tambahan pagu sebesar Rp 190.000.000 berasal dari dua Sub Kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- p. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*, pada program ini penambahan pagu Penambahan dialokasikan untuk membiayai tim pembina dan penilai Desa Ramah





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- q. lingkungan diluar Tim yang ada di DLHK (Perjalanan Dinas dan Honorarium) selain itu sub kegiatan ini menaungi penilaian untuk Adiwiyata, dan Kalpataru pada sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahan target desa ramah lingkungan.
- r. *Program Pengelolaan Persampahan*, dari keseluruhan program yang dilaksanakan tahun 2024, kenaikan pagu yang sangat signifikan ada pada pada program pengelolaan persampahan, dari pagu rancangan awal senilai Rp 12.160.000.000,00 menjadi Rp 85.890.081.808,00 atau naik sebesar Rp 73.730.081.808. tambahan dana tersebut selain limpahan urusan persampahan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga merupakan tambahan dana yang disetujui untuk pembangunan TPS3R dan Pengadaan kendaraan alat angkut sampah yang menjadi salah satu indikator pada program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan.

Berkut ini adalah tabel Rencana Kerja 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (TC 31).





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tabel TC 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN														
Rancangan Awal RKPD/Renstra PD							Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Selisih (+/-)	Catatan Penting		
1	2	7	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,9	Nilai	14.605.680.979	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,9	Nilai	18.628.665.432	4.022.984.453	Sesuai Dengan Target Awal Perencanaan Renstra, Penambahan Pagu Program dikarenakan adanya penambahan pada Sub Kegiatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dokumen	358.551.421	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Dokumen	277.380.000	(81.171.421,00)	Perubahan Target Kegiatan berkurang menyesuaikan dokumen yang dibuat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	72.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	157.380.000	85.380.000,00	Diseuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan penambahan untuk perubahan Renstra OPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	286.551.421	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	120.000.000	(166.551.421,00)	Penganggaran pagu disesuaikan dengan Evaluasi tahun sebelumnya, selisib anggaran ditambahkan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Jasa Komukasi Sumber Day Air dan Listrik
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Laporan	11.797.107.886	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Laporan	11.207.137.962	(589.969.924,00)	Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Triwulan dan Prognosis
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/Bulan	11.592.107.886	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104	Orang/Bulan	11.002.137.962	(589.969.924,00)	Penambahan menyesuaikan dengan rekonsiliasi gaji
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	Laporan	205.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	Laporan	205.000.000	-	Pagu rancangan awal dan analisis kebutuhan tidak berubah, dikarenakan batasan pagu pembayaran honorarium masih berada ada Range yang sama
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	Laporan	48.880.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	Laporan	48.880.000	-	Laporan Semester 1 dan Laporan Semester 2
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	48.880.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	48.880.000	-	Laporan rekonsiliasi adalah kertas kerja laporan triwulan, semester dan Tahunan, tidak ada perubahan dengan rancangan awal
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	50.550.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	785.010.000	734.460.000,00	Dokumen yang dihasilkan adalah dokumen analisis kepegawaian, kenaikan pangkat, dan Sasaran Kinerja Pegawai
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0	Stell	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	326	Stell	334.460.000	334.460.000,00	Pengadaan pakaian Dinas Waslat dan Baju Putih, Pengadaan baju terakhir dilakukan tahun 2018
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	50.550.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	50.550.000	-	Dokumen yang dihasilkan adalah dokumen analisis kepegawaian, kenaikan pangkat
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	400.000.000	400.000.000,00	Tindak lanjut dari perjanjian kinerja Eselon II butir ke 14 "Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;"



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 29
Bab II Evaluasi Renja



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Dokumen	429.227.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Dokumen	1.416.000.000	986.773.000,00	kenaikan target capaian kinerja mengikuti penambahan pagu dan tambahan sub kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	Paket	81.909.645	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	150.000.000	68.090.355,00	Bertambahnya beban kerja menjadikan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Alat Tulis Kantor semakin meningkat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Jenis	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	30.000.000,00	Pengadaan Gelas, Teko, Dispenser, piring untuk fasilitas kegiatan rapat dalam rangka pembatasan penggunaan sampah kertas dan plastik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.17 2.150 3.75	Paket	28.057.258	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	242	Paket	28.000.000	(57.258,00)	Pengurangan pagu disesuaikan hasil evaluasi, dan target adalah penjumlahan dari target Ramwal, menyesuaikan dengan satuan indikator
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.3 2.5000	Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5003	Paket	8.000.000	-	kebutuhan tahun 2024 masih sesuai dengan Rancangan awal, tidak ada perubahan target adalah penjumlahan dari target Ramwal, menyesuaikan dengan satuan indikator
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	50.000,00	Exemplar	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000.000,00)	Kegiatan tidak dilaksanakan, media baca beralih ke elektronik
Penyediaan Bahan/Material	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	Jenis	-	Penyediaan Bahan/Material	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	100.000.000	100.000.000,00	Untuk Mendanai Kegiatan Pameran Merah Putih, Pameran Erau, Pameran Pelaksanaan Lingkungan Tingkat Kabupaten dan Nasional
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	Laporan	308.260.097	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	Laporan	500.000.000	191.739.903,00	Hasil Evaluasi Anggaran tahun 2022 ada beberapa perjalanan tidak dapat di SPJ karena kekurangan pagu dan adanya penambahan-penambahan pekerjaan yg diperlukan koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	Berkas	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	250.000.000	250.000.000,00	Sesuai Intruksi Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-820/DIARPUS/45.1/02/2020 untuk menganggarkan terkait dengan kearsipan, tahun 2022 tidak ada penganggaran dan nilai kearsipan DLHK masih di kategori "C karang"
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	350.000.000	350.000.000,00	Pengembangan Website Perangkat Daerah dengan menambah Fitur update data dan pembuatan Aplikasi Pembayaran pengujian Sample pada UPTD Laboratorium



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 30
Bab II Evaluasi Renja



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0	Persen	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	914.822.950	914.822.950,00	Penambahan Kegiatan untuk menunjang beberapa kebutuhan mendesak terkait pengadaan Barang Milik Daerah
Pengadaan Alat Besar	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah unit	0	unit	-	Pengadaan Alat Besar	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	unit	-	-	
Pengadaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Barang Milik Daerah	0	unit	-	Pengadaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	600.000.000	600.000.000,00	Kondisi Meja Kerja, Kursi yang rusak berat dan bertambahnya jumlah ASN yang tidak sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	0	unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	274.822.950	274.822.950,00	Pengadaan AC, Televisi dan video conference, sound system (sesuai dengan identifikasi barang rusak berat)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	40.000.000	40.000.000,00	Sesuai dengan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum tanggal 20 Maret 2023, Penganggaran Pembangunan Gedung Kantor di Anggarakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kutai Kartanegara, yang dianggarkan DLHK hanya biaya Sewa Gedung Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	1.797.039.672	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	2.233.434.520	436.394.848,00	Tidak ada perubahan Target waktu penyediaan jasa, tetap dilaksanakan satu tahun dari Januari sd Desember 2023
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	252.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	290.052.000	38.052.000,00	Adanya kenaikan tarif dasar listrik dan penambahan pemakaian untuk supply listrik di bangunan DAK ONLIMO di Kersohan dan Muara Muntai yang tidak menambah jumlah laporan yang harus disusun selama 1 tahun pelaksanaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.545.039.672	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.943.382.520	398.342.848,00	Penambahan 5 orang tenaga Analis Laboratorium jenjang pendidikan SI dan Belajar Pihak Ketiga untuk Cleaning Service, untuk target adalah target maksimal laporan mengikuti 1 tahun (12 Bulan) Pelaksanaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	64,5	Persen	124.325.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80	Persen	1.746.000.000	1.621.675.000,00	Kenaikan target pemeliharaan dikarenakan jumlah unit yang dipelihara mengalami kenaikan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	1	unit	16.873.520	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	275.000.000	258.126.480,00	Disesuaikan dengan Pagu pada DPA 2023 dan terdapat kenaikan biaya Sewa untuk Kendaraan Dinas Eselon II
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	-	unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	5	unit	1.136.000.000	1.136.000.000,00	Penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional sebanyak 5 unit karena 2 kendaraan dinas operasional dalam kondisi Rusak
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	unit	35.000.000	35.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan seperti AC, Komputer dan Printer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1	Unit	107.451.480	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1	Unit	300.000.000	192.548.520,00	Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 31
Bab II Evaluasi Renja



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	Persen	400.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	Persen	960.000.000	560.000.000,00	Target Sesuai dengan Rancangan Awal dengan memperhitungkan kemampuan menyelesaikan Dokumen Perencanaan Lingkungan dari Sisi Proses Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Tersusunnya RPPLH	4	Dokumen	400.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Tersusunnya RPPLH	2	Dokumen	400.000.000	-	Penyesuaian Target mengikuti target dokumen yang dapat di selesaikan
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengkomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1. 4 2. -	1. Dokumen	400.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengkomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2	Dokumen	400.000.000	-	1. Jumlah Pagi antara Rawal dan Hasil analisis kebutuhan tidak mengalami perubahan, namun target berubah dari 4 Dokumen menjadi 2 Dokumen (Dokumen DIKPLHD dan Dokumen IKLH) pengurangan target ini dikarenakan dua dokumen lainnya (Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung dan Value Ekonomi belum dapat diuruskan prosesnya karena tahapan verifikasi provinsi belum selesai 2. Ada Kenaikan Standar Tenaga Ahli yang digunakan sehingga berpengaruh pagi yang ada dialihkan untuk hal tersebut
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Terselenggaranya KLHS	0	Dokumen	-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Terselenggaranya KLHS	1	Dokumen	560.000.000	560.000.000,00	Penyesuaian Target sesuai dengan Jadwal dan Tahapan penyusunan Dokumen KLHS
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		1. Dokumen 2. data	-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	560.000.000	560.000.000,00	pada perubahan 2023 akan dianggarkan pembiayaan Penyusunan KLHS RPJMD Perubahan, jika dianggarkan pada perubahan 2023 tahapan pelaksanaan KLHS RPJMD tidak bisa selesai di 2023, sehingga tahapan selanjutnya akan dianggarkan di 2024
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200.000	Pohon	2.425.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200.000	Pohon	3.354.920.000	929.920.000,00	Program Dedikasi Dunia Usaha Rumah Lingkungan dan Program Pencapaian Visi Misi Tujuan RPJMD dan Renstra PD
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4	Dok	1.540.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4	Dokumen	2.446.920.000	906.920.000,00	Merupakan kegiatan pendukung capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra OPD
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Dokumen	420.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Dokumen	643.920.000	223.920.000,00	1. Program Penunjang Tujuan RPJMD dan Sasaran Renstra 2. Penambahan untuk dana pendamping DAK Fisik di Kenohan dan Muara Muntai untuk Honorarium Operator Online dan biaya pemeliharaan bangunan dan Alat ONLIMO
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	365.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	365.000.000	-	Program Penunjang pencapaian Target, Tujuan Visi Misi RPJMD urusan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	Dokumen	755.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	Dokumen	1.438.000.000	683.000.000,00	Penambahan untuk pengadaan peralatan uji laboratorium untuk pembaruan parameter dan peningkatan kapasitas tenaga analis laboratorium



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 32
Bab II Evaluasi Renja



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Laporan	199.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	Laporan	122.000.000	(77.000.000,00)	Penambahan Target menyesuaikan dengan Laporan pada Sub Kegiatan
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	Laporan	45.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	Laporan	45.000.000	-	Hasil Analisis kebutuhan sesuai dengan Rencana awal berupa penyampaian informasi pencemaran melalui media elektronik dan media non elektronik
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	25	Lokasi	77.000.000	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	25	Lokasi	77.000.000	-	Tidak ada perubahan target maupun pagu Ranwal dan Hasil analisis, jumlah lokasi menyesuaikan dengan rata-rata lokasi pencemaran per tahunnya
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Kutai Kartanegara	-	50	Titik	77.000.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	(77.000.000,00)	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tumpang tindih dengan kegiatan lain
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	686.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3	Dokumen	786.000.000	100.000.000,00	Penambahan Target menyesuaikan dengan Laporan pada Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1	Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1	Dokumen	300.000.000	200.000.000,00	Tambahan Rp 250.000.000 digunakan untuk penyusunan dokumen peta jalan (roadmap) pengendalian pencemaran air di Kutai Kartanegara
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	-	-	1	Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	-	-	-	-	-	(100.000.000,00)	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena proses remediasi dilakukan langsung oleh pelaku sumber pencemar
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	Dokumen	321.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	Dokumen	321.000.000	-	Kegiatan ini merupakan program Dedikasi Dunia Usaha Ramah Lingkungan, dan juga untuk memfasilitasi rehabilitasi lingkungan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Sungai Maglurawang, dan sungai tenggarong	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	Dokumen	165.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Sungai Maglurawang, dan sungai tenggarong	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	Dokumen	165.000.000	-	Anggaran digunakan untuk pembersihan daerah sempadan sungai dengan dua titik Lokasi akibat Galma, dan pohon tumbang
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	20	Persen	2.220.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	20	Persen	2.275.000.000	55.000.000,00	Target pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Sebesar 20 % adalah target RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (taman kota, hutan kota, salak hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten Kota	1	Dokumen	2.220.000.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten Kota	0	Dokumen	2.275.000.000	55.000.000,00	Perubahan target pemeliharaan menyesuaikan dengan rencana penanaman pada tahun 2023
		Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaragaman hayati	50	Persen				Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaragaman hayati	80	Persen			
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	0	Dokumen	195.000.000		-		-	-	-	(195.000.000,00)	Rencana awal pada Tahun 2024 akan disusun dokumen Rencana Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), namun sampai dengan saat ini belum ada ditemukan lokasi untuk penetapan kawasan , selain dengan proses penetapan yang memakan waktu yang lama.



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 33
Bab II Evaluasi Renja



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Muara Kaman (Desa Bunga Jadi) , Tenggarong Seberang (Desa Loa Raya dan Desa Bangun Rejo)	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	26	Hektar	580.000.000	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Muara Kaman (Desa Bunga Jadi) , Tenggarong Seberang (Desa Loa Raya dan Desa Bangun Rejo)	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	26	Hektar	580.000.000	-	Perubahan Lokasi dikarenakan hanya dua lokasi ini yang dapat mendukung program, sedang kan lokasi lainm (loa janan dan Samboja, Sanga-sanga) terlikt dengan IKN, pada Tahun 2023 dilakukan penanaman dan 2024 untuk pemeliharaan
pengelolaan kebun raya	Desa Jembayan Tengah Loa Kulu	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Hektar	635.000.000	pengelolaan kebun raya	Desa Jembayan Tengah Loa Kulu	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Hektar	635.000.000	-	Lokasi adalah Hibah dari PT. Mega Prima Persada (MPP) di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tenggarong, Tenggarong Seberang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	10	Hektar	810.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tenggarong, Tenggarong Seberang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	10	Hektar	1.060.000.000	250.000.000,00	Penambahan untuk perencanaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Loa Kulu hasil dari Kesepakatan Forum Perangkat Daerah DLHK 21 Maret 2023
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah Dokumen Kajian timbalan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	4	Dokumen	175.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian timbalan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	4	Dokumen	375.000.000	200.000.000,00	Target disesuaikan dengan rancangan awal
Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah pelaku usaha	50	Pelaku usaha	100.000.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pelaku usaha	50	Pelaku usaha	75.000.000	(25.000.000,00)	Target Pelaku Usaha Tidak berubah mengikuti Pelaku Usaha yang Teregister
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	50,00	Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			-	-	-	(25.000.000,00)	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena batas kewenangan, sehingga anggaran dialihkan ke sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50,00	Laporan	75.000.000,00	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50	Laporan	75.000.000	-	Berdasarkan hasil Evaluasi Tahun sebelumnya dan melihat jenis dan jumlah pelaku usaha tidak ada perbedaan dari rancangan awal
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	50	Pelaku usaha	75.000.000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	50	Pelaku usaha	300.000.000	225.000.000,00	Target Pelaku Usaha Tidak berubah mengikuti Pelaku Usaha yang Teregister
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2	Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2	Dokumen	300.000.000	225.000.000,00	Penambahan Pagu digunakan untuk penyusunan Dokumen Kajian Timbalan Limbah B3 dan pelaksanaan agenda seminar penyimpanan limbah B3 medis pada Fasilitas Kesehatan sesuai PP No 56 Tahun 2015





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,32	Persen	600.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,32	Persen	890.000.000	290.000.000,00	Target disesuaikan dengan rancangan awal menyesuaikan dengan Tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan hidup (RPLH) yang dimiliki
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	20	Persen	600.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	25	Persen	890.000.000	290.000.000,00	Penambahan target mengikuti penambahan jumlah pengawasan yang dilakukan
Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120	Dokumen	102.000.000	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120	Dokumen	102.000.000	-	hasil analisis kebutuhan sesuai dengan rancangan awal Renstra, tidak ada perubahan target dan pagu untuk membiayai proses fasilitasi pemenuhan pemberian Rekomendasi ataupun izin lingkungan
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9	Orang	100.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9	Orang	250.000.000	150.000.000,00	Penambahan Pagu dilakukan dalam rangka peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH) sebagai salah satu syarat Perpanjangan izin pengawasan
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	129	Laporan	310.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	129	Badan Usaha	350.000.000	40.000.000,00	1. Program Dedikasi Dunia Usaha Ramah Lingkungan 2. Penambahan Pagu melihat evaluasi tahun sebelumnya jumlah pelaku usaha yang diawasi meningkat menjadi 129 pelaku usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	20	Dokumen	88.000.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	20	Perkara	188.000.000	100.000.000,00	Hasil analisis kebutuhan sesuai dengan rancangan awal Renstra dan Tidak ada perubahan target ataupun pagu anggaran
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten/Kota	75	Persen	75.000.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenoh, Kota Bangun	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten/Kota	75	Persen	75.000.000	-	Target sesuai dengan Rancangan Awal dengan memperimbangan kemampuan menyelesaikan identifikasi sampai ke tahap penetapan dan waktu yang diperlukan selama satu tahun
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten/Kota	75	Persen	40.000.000	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenoh, Kota Bangun	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten/Kota	75	Persen	40.000.000	-	Target Tahun 2024 adalah penambahan jumlah MHA yang ditetapkan sebanyak 2MHA dan Identifikasi calon MHA baru
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenoh, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	6	Dokumen	40.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenoh, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	6	Dokumen	40.000.000	-	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	70	Persen	35.000.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenoh, Kota Bangun	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	70	Persen	35.000.000	-	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenoh, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	35.000.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenoh, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	35.000.000	-	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 35
Bab II Evaluasi Renja



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	35	Lembaga	240.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	35	Lembaga	240.000.000	-	Sesuai dengan target rencana awal, nilai yang ditargetkan adalah nilai maksimal yang dapat ditangani pertama dengan memperhatikan SDM yang dimiliki
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	35	kali	240.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	35	kali	240.000.000	-	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarrong	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2	Lembaga	80.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarrong	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2	Lembaga	80.000.000	-	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	30	Dokumen	80.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	30	Dokumen	80.000.000	-	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu, pendampingan dilakukan ke 30 Sekolah Adiwiyata yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara
Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	350	Orang	80.000.000	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	350	Orang	80.000.000	-	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Desa/keurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	5	Desa/Kelurahan	100.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Desa/keurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	5	Desa/Kelurahan	650.000.000	550.000.000,00	Sesuai dengan Rancangan Awal
		2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	128	Penghargaan				2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	128	Penghargaan			
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	2	Jenis	100.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	2	Jenis	650.000.000	550.000.000,00	Program Dedikasi Desa Ramah Lingkungan, dengan dua Jenis Penghargaan yang diberikan adalah penghargaan desa ramah lingkungan dan Sekolah Adiwiyata
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	100	Entitas	100.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	111	Entitas	650.000.000	550.000.000,00	Program Dedikasi Desa Ramah Lingkungan Penambahan dialokasikan untuk membiayai tim pembina dan penilai Desa Ramah lingkungan di luar Tim yang ada di DLHK (Perjalanan Dinas dan Honorarium) selain itu sub kegiatan ini menaungi penilaian untuk Adiwiyata, dan Kalpataru dan perubahan target desa ramah lingkungan



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 36
Bab II Evaluasi Renja



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	97	Persen	200.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	97	Persen	100.000.000	(100.000.000,00)	Sesuai dengan target rencana awal, nilai yang ditargetkan adalah nilai maksimal
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	50	Laporan	200.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	40	Laporan	100.000.000	(100.000.000,00)	Perubahan target menyesuaikan dengan target laporan pada sub kegiatan yang dapat dilaksanakan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	20	Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	20	Pengaduan	100.000.000	-	Hasil Analisis Kebutuhan sesuai dengan Rencana Awal, target yang ditetapkan disesuaikan dengan rata-rata pengaduan yang teregistrasi dan yang dapat ditangani dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan selama satu tahun
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	20	Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	(100.000.000,00)	Hasil Analisis Kebutuhan sesuai dengan Rencana Awal, target yang ditetapkan disesuaikan dengan rata-rata pengaduan yang teregistrasi dan yang dapat ditangani dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan selama satu tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun 2. Timbulan sampah	1 97,64	Lokasi Persen	12.160.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun 2. Timbulan sampah	1 97,64	Lokasi Persen	85.890.081.808	73.730.081.808,00	Untuk target TPA dan Timbulan Sampah tidak mengalami perubahan sebagaimana yang tertera pada Dokumen Jakstrada, penambahan unit sarana prasarana adalah komponen pendukung timbulan sampah yang dapat ditangani
Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani 2. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R 3. Persentase cakupan area pelayanan	72 12,73 61,11	Persen Persen Persen	11.800.000.000	Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani 2. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R 3. Persentase cakupan area pelayanan	72 12,73 61,11	Persen Persen Persen	85.890.081.808	74.090.081.808,00	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3	Dokumen	270.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota	Sekarame, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3	Dokumen	380.000.000	110.000.000,00	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan yang diperumukakan untuk penyusunan regulasi terkait pengelolaan sampah (Penyusunan Dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah dan Penyusunan Peraturan Bupati terkait kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Sampah)
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	380.000.000	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kecamatan Tenggarong, Muara Wis, Muara Murai, Muara Kaman, Sanga-Sanga	Jumlah sampah yang terdaur ulang	60865,6032	Ton	14.300.000.000	13.920.000.000,00	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan Pembangunan TPS3R dan Sarana Pendukungnya, pembangunan TPS3R belum ada dan ini sistem wajib untuk mendukung Adipura Kabupaten



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 37
Bab II Evaluasi Renja



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60865,6032	Laporan	1.950.000.000	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	15	Unit	27.749.272.000	25.799.272.000,00	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan Tambahan Rp 25.799.272 adalah pelimpahan dana kebersihan dan pertamanan dari Dinas Perkim untuk Honor Pasukan Merah Putih
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5	Kelompok	750.000.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Bangun, Tenggarong, Kenoh, Muara Wis,	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5	Kelompok	400.000.000	(350.000.000,00)	Pengurangan Dilakukan sebagaimana hasil evaluasi dan anggaran di alihkan ke sub kegiatan pengurangan sampah
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3	Dokumen	1.700.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Marang Kayu, Kecamatan Sebulu, Kenoh, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Kenoh, Kecamatan Loa Janan, Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	7	Dokumen	3.400.000.000	1.700.000.000,00	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan Dukungan Penyusunan Dokumen DED,UKL, UPL, Amdal Pembangunan TPA, pengurangan Penyusunan Dokumen UKL, UPL, TPA Kecamatan Loa Janan (Dianggarkan di perubahan 2023 di Dinas PU)
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	Dokumen	200.000.000	100.000.000,00	Penambahan pagu digunakan untuk kegiatan-kegiatan terkait kerjasama penanganan sampah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	652	Unit	6.650.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	18 Kecamatan di Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5952	Unit	39.460.809.808	32.810.809.808,00	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan * Pengadaan kendaraan alat angkut sampah, alat berat pendukung * Mendukung pencapaian Presentase anggaran pengelolaan lingkungan terhadap nilai APBD Kabupaten (1-3%) Tambahan baru mengkomodir usulan musrenbang (pembangunan TPS3R dan Sarana Pendukungnya dan Pengadaan Kendaraan Pendukung Bank Sampah) *Tambahan Dana Sebesar Rp 604.100.000 (pikir) pengadaan Dump Truk di Sumber Sari
Penerbitan Izin Pendaundangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	33,33	Persen	75.000.000	Penerbitan Izin Pendaundangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	-	-	-	-	-	(75.000.000,00)	Belum dapat dilaksanakan karena belum ada usulan dari pihak swasta
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	10	Rekomendasi	75.000.000	-	-	-	-	-	-	(75.000.000,00)	Sampai Saat Ini Belum Ada Usulan dan Penerbitan Rekomendasi Terhadap Pelaku usaha yang Bergerak di Bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Sehingga Belum Bisa di Targetkan Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasannya untuk pagi anggaran di alihkan ke Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 38
Bab II Evaluasi Renja



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	55	Persen	285.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-	-	-	(285.000.000,00)	Belum dapat dilaksanakan karena belum ada usulan dari pihak swasta
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	15,00	Laporan	55.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	-	-	-	-	(55.000.000,00)	Sampai Saat Ini Belum Ada Usulan dan Penerbitan Rekomendasi Terhadap Pelaku usaha yang Bergerak di Bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Sehingga Belum Bisa di Targetkan Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan nya untuk pagu anggaran di alihkan ke Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	50,00	Unit	155.000.000	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	-	-	-	-	(155.000.000,00)	Sampai Saat Ini Belum Ada Usulan dan Penerbitan Rekomendasi Terhadap Pelaku usaha yang Bergerak di Bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Sehingga Belum Bisa di Targetkan Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan nya untuk pagu anggaran di alihkan ke Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	25,00	Laporan	75.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	-	-	-	-	(75.000.000,00)	Sampai Saat Ini Belum Ada Usulan dan Penerbitan Rekomendasi Terhadap Pelaku usaha yang Bergerak di Bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Sehingga Belum Bisa di Targetkan Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan nya untuk pagu anggaran di alihkan ke Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Muara Kamam, Muara Siran	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	16,67	Persen	300.000.000	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Muara Kamam, Muara Siran	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	16,67	Persen	150.000.000	(150.000.000,00)	Persentase Penyelesaian perencanaan disesuaikan dengan target awal
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Muara Kamam, Muara Siran	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Muara Kamam, Muara Siran	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dokumen	150.000.000	(150.000.000,00)	Tidak ada perubahan Target Dokumen, Dokumen yang di hasilkan adalah dokumen Tahapan rencana pengelolaan dan Penetapan Taharu
Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Muara Kamam, Muara Siran	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300.000.000	Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Muara Kamam, Muara Siran	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1	Dokumen	150.000.000	(150.000.000,00)	Sebagaimana hasil evaluasi tahun sebelumnya bahwa kegiatan Tahura masih dalam tahap/proses penetapan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anggaran yang ada digunakan untuk memfasilitasi tim penataan blok Tahura dengan catatan Penetapan Tahura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2023 dapat diselesaikan
					33.500.680.979						113.588.667.240	80.087.986.261	



Rencana Kerja (Renja) 2024
DLHK Kab Kutai Kartanegara

Page 40

Bab II Evaluasi Renja



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.5. Penelahaan usulan Program dan kegiatan masyarakat

Semakin kompleksnya permasalahan di Bidang lingkungan hidup memerlukan berbagai masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, LSM, Institusi pendidikan dan instansi pemerintah terkait lainnya. Usulan program dan kegiatan masyarakat ini diperoleh dari musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah Daerah yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

TABEL TC.32 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/PENGELOLAAN SAMPAH/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Muara Kaman	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	1 Unit	Usulan Diproses : Sesuai Prioritas dan Kamus usulan pengadaan dumptruck 2024 terfasilitasi di Kecamatan Muara Kaman sebanyak 1 unit (tahun 2021 sudah terfasilitasi 1 unit)
2		Sanga Sanga	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan
3		Anggana	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	-	Usulan Diterima : Proses (untuk Kecamatan) pengadaan pick up 2024 difasilitasi di Kecamatan Anggana sebanyak 1 unit untuk tahun 2021 sebanyak 1 unit dump truck
4		Anggana	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan di Tolak : Sudah Diproses untuk Kecamatan pengadaan roda tiga tahun 2021 difasilitasi di Kecamatan Anggana sebanyak 9 unit, pickup dan dump truck masing- masing sebanyak 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024 -
5		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Ditolak (sudah diproses untuk fasilitas Kecamatan) pengadaan roda tiga tahun 2024 difasilitasi di Kecamatan Muara Badak sebanyak 3 unit, tahun 2022 sudah difasilitasi dumptruck 1 unit, pickup dan dump truck masing- masing sebanyak 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024
6		Kota Bangun	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	3 Unit	Usulan Diproses : Pemenuhan Kecamatan pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 3 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2020 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck dan 6 pickup oleh DisPerkim dan tahun 2021 difasilitasi Dump truck oleh Dinas LHK sebanyak 2 unit





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

7		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	1 Unit	Usulan Diproses (untuk Kecamatan Muara Badak 1 unit) pengadaan dumptruk 2024 terfasilitasi di Kecamatan Muara Badak sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
8		Muara Wis	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan roda tiga 2021 difasilitasi di Kecamatan Muara Wis sebanyak 1 unit, pickup tahun 2022 sebanyak 1 unit dan 4 unit diusulkan tambahan pagu perubahan tahun 2023, pickup 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024
9		Muara Wis	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan pick up 2023 difasilitasi di Kecamatan Muara wis sebanyak 1 unit dan untuk tahun 2022 sebanyak 1 unit dump truck
10		Muara Wis	Pengadaan Madu Kelulut (Kelenceng)	-	DIBATALKAN
11		Marang Kayu	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Marangkayu sebanyak 3 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2022 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck
12		Muara Kaman	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan dumptruk 2024 terfasilitasi di Kecamatan Muara Badak sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
13		Kota Bangun	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan dumptruk 2021 terfasilitasi di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 2 unit
14		Muara Muntai	Pengadaan Mesin Paving Block Sampah	-	Usulan Di tolak : Tidak termasuk Prioritas Desa Muara Muntai Ulu untuk tahun 2024 belum Masuk prioritas pengadaan mesin Paving Blok untuk pengelolaan sampah TPS3R di Kecamatan Muara Muntai akan di usulkan melalui penambahan anggaran 2024
15		Muara Muntai	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	1 Unit	Usulan Di Proses : Pemenuhan di Kecamatan pengadaan pick up 2023 difasilitasi di Kecamatan Muara Muntai sebanyak 1 unit dan untuk tahun 2024 sebanyak 1 unit
16		Kota Bangun	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	-	Usulan Di Tolak : Tidak Termasuk Prioritas pengadaan pick up 2020 terfasilitasi di Kecamatan Kota Bangun sudah terfasilitasi Dinas Perkim sebanyak 6 unit
17		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan dumptruk 2024 terfasilitasi di Kecamatan Muara Badak sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
18		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan
19		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan
20		Sebulu	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	1 Unit	Usulan Di Proses : (Untuk Kecamatan) pengadaan pick up 2024 difasilitasi di Kecamatan Sebulu sebanyak 1 unit untuk tahun 2022 sebanyak 1 unit dump truck





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

21		Kota Bangun	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan pengadaan pick up 2020 terfasilitasi di Kecamatan Kota Bangun sudah terfasilitasi Dinas Perkim sebanyak 6 unit
22		Muara Wis	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan roda tiga 2021 difasilitasi di Kecamatan Muara Wis sebanyak 1 unit, pickup tahun 2022 sebanyak 1 unit dan 4 unit diusulkan tambahan pagu perubahan tahun 2023, pickup 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024
23		Muara Muntai	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)		Usulan Ditolak (proses untuk kecamatan) pengadaan pick up 2023 difasilitasi di Kecamatan Muara Muntai sebanyak 1 unit dan untuk tahun 2024 sebanyak 1 unit
24		Tenggarong	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Tenggarong sudah difasilitasi dan ditangani operasionalnya oleh Dinas Perkim
25		Tenggarong	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Tenggarong sudah difasilitasi dan ditangani operasionalnya oleh Dinas Perkim
26		Marang Kayu	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Ditolak : pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Marangkayu sebanyak 3 unit dan pickup sebanyak 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2022 sudah difasilitasi dump truck sebanyak 1 unit
27		Samboja	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)		Diproses (untuk Kecamatan Samboja 1 unit) pengadaan dumptruck 2024 terfasilitasi di Kecamatan Samboja sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
28		Muara Jawa	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	1 Unit	Usulan Diproses (untuk Kecamatan Muara Jawa 1 unit) pengadaan dumptruck 2024 terfasilitasi di Kecamatan Muara Jawa sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
29		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Ditolak : Prioritas pemenuhan Kecamatan pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Muara Badak sebanyak 3 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2022 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck
30		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Ditolak : Prioritas pemenuhan Kecamatan pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Muara Badak sebanyak 3 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2022 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck
31		Loa Janan	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	1 Unit	Usulan Diproses (untuk Kecamatan Loa Janan 1 unit) pengadaan dumptruck 2024 terfasilitasi di Kecamatan Loa Janan sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
32		Marang Kayu	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Diproses : pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Marangkayu sebanyak 3 unit dan pickup sebanyak 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2022 sudah difasilitasi dump truck sebanyak 1 unit
33		Marang Kayu	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	1 Unit	Usulan Diproses : Sesuai Lokasi Prioritas pengadaan pick up 2024 difasilitasi di Kecamatan Marang Kayu sebanyak 1 unit untuk tahun 2022 sebanyak 1 unit dump truck
34		Marang Kayu	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Ditolak : Bukan Wilayah Prioritas Pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Marangkayu sebanyak 3 unit dan pickup sebanyak 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2022
35		Kenohan	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	1 Unit	Di Proses : Sesuai Prioritas dan Kamus usulan Pengadaan dumptruck 2024 terfasilitasi di Kecamatan Kenohan sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

36		Sanga Sanga	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	1 Unit	Usulan Diproses : Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan (untuk Kecamatan Muara Kaman 1 unit)-
37		Sanga Sanga	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan pick up 2023 terfasilitasi di Kecamatan Sanga sanga sebanyak 1 unit
38		Sanga Sanga	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan dumptruk 2024 terfasilitasi di Kecamatan Kenohan sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
39		Sanga Sanga	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan dumptruk 2024 terfasilitasi di Kecamatan Sanga sanga sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
40		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	3 Unit	Usulan Di Proses : Sesuai Kamus Usulan pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Muara Badak sebanyak 3 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2022 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck
41		Tenggarong	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas Untuk fasilitasi bank sampah hanya sebatas roda tiga karena pihak DLHK sudah menfasilitasi untuk bantuan operasional alat angkut untuk proses penjualan hasil bank sampah
42		Kota Bangun	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 3 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2020 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck dan 6 pickup oleh DisPerkim dan tahun 2021 difasilitasi Dump truck oleh Dinas LHK sebanyak 2 unit
43		Muara Kaman	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan Diproses : Fasilitasi untuk Kecamatan pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Muara Kaman sebanyak 3 unit, dan pickup 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2021 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck
44		Sebulu	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	3 Unit	Usulan Diproses : Fasilitasi untuk Kecamatan pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Sebulu sebanyak 3 unit, dan pickup 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2021 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck
45		Sebulu	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	1 Unit	Usulan Diproses : (untuk Kecamatan Sebulu 1 unit) pengadaan dumptruk 2024 terfasilitasi di Kecamatan Sebulu sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
46		Tenggarong Seberang	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	1 Unit	Usulan Diproses : Fasilitasi untuk Kecamatan pengadaan pick up 2024 difasilitasi di Kecamatan Tenggarong Seberang sebanyak 1 unit tahun 2021 sudah difasilitasi drum truck sebanyak 2 unit
47		Muara Kaman	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Muara Kaman sebanyak 3 unit, dan pickup 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2021 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck
48		Kembang Janggut	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan dumptruk 2024 terfasilitasi di Kecamatan Kembang Janggut sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
49		Kembang Janggut	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	1 Unit	Usulan Diproses : Fasilitasi untuk Kecamatan pengadaan pick up 2024 difasilitasi di Kecamatan Kembang Janggut sebanyak 1 unit tahun 2022 sudah difasilitasi drum truck sebanyak 1 unit
50		Muara Jawa	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas Untuk pembangunan TPS3R kelurahan dondang belum masuk progres prioritas tahun 2024, untuk pengelolaan sampah TPS3R di desa dondang bisa dikoordinasikan pengelolaannya dengan pengelolaan sampah TPST3R di kelurahan muara jawa tengah





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

51		Muara Jawa	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)		Usulan Diproses : Prioritas Pemenuhan Kecamatan pengadaan pick up 2024 difasilitasi di Kecamatan Muara Jawa sebanyak 1 unit
52		Sebulu	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Sebulu sebanyak 3 unit, dan pickup 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2021 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck
53		Anggana	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	1 Unit	Usulan Diproses : untuk Kecamatan Anggana 1 unit pengadaan dumptruck 2024 terfasilitasi di Kecamatan Kembang Janggut sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
54		Kota Bangun	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan roda tiga 2024 difasilitasi di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 3 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024, dan tahun 2020 sudah difasilitasi sebanyak 1 unit dump truck dan 6 pickup oleh DisPerkim dan tahun 2021 difasilitasi Dump truck oleh Dinas LHK sebanyak 2 unit
55		Kota Bangun	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan pengadaan pick up 2020 terfasilitasi di Kecamatan Kota Bangun sudah terfasilitasi Dinas Perkim sebanyak 6 unit
56		Muara Jawa	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas
57		Muara Jawa	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas
58		Marang Kayu	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)		Usulan Diproses (untuk Kecamatan Marangkayu 1 unit) pengadaan dumptruck 2024 terfasilitasi di Kecamatan Marangkayu sebanyak 1 unit (tahun 2022 sudah terfasilitasi 1 unit)
59		Kota Bangun	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan pick up 2020 terfasilitasi di Kecamatan Kota Bangun sudah terfasilitasi Dinas Perkim sebanyak 6 unit
60		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan
61		Kembang Janggut	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan
62		Muara Badak	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)		Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan
63		Muara Kaman	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)		Ditolak (sudah diproses untuk fasilitas Kecamatan) pengadaan roda tiga tahun 2021 difasilitasi di Kecamatan Anggana sebanyak 9 unit, pickup dan dump truck masing-masing sebanyak 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024
64		Tenggarong Seberang	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh) (tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acacia crassiparpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kalandra)		Usulan Dikembalikan untuk dilengkapi terkait : 1. Memastikan jumlah Luasan 2. Memastikan Status Lahan (Perorangan/keompok, Desa) 3. Memastikan Perolehan Lahannya 4. Acacia Crassiparpa tidak di anjurkan karena bisa mengganggu pemapasan
65		Tenggarong	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh) (tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acacia crassiparpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kalandra)		Usulan Dikembalikan untuk dilengkapi terkait : 1. Memastikan jumlah Luasan 2. Memastikan Status Lahan (Perorangan/keompok, Desa)





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

67		Muara Muntai	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	-	Usulan Di Proses : - Sesuai Prioritas Sesuai progres pembangunan TPS3R di DLHK tinggal penyesuaian pembangunan di desa prioritas
68		Muara Badak	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	-	Usulan Di Tolak : Tidak Sesuai Prioritas Desa Badak baru untuk tahun 2024 belum Masuk prioritas pembangunann TPS3R dengan dasar pertimbangan bahwa desa badak baru untuk pengelolaan sampah dalam hal penanganan sampah masih tertangani dalam pengangkutan sampah dengan pertimbangan akses jalan mendukung dan lokasi TPA Open Dumping di desa batu-batu memenuhi kretria penanganan
69		Muara Badak	Pengadaan Mesin Paving Block Sampah	-	Usulan Ditolak Tidak Sesuai Lokasi Prioritas Desa Badak Baru untuk tahun 2024 belum Masuk prioritas pengadaan mesin Paving Blok karena prioritas untuk pengadaan sarana alat angkut dumptruck dan Pick up
70		Samboja	Pencacah Sampah Organik	-	Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas Kelurahan Wonotirto untuk tahun 2024 belum Masuk prioritas pengadaan mesin cacah sampah organik untuk penanganan sampah sudah di kelola oleh forum sahabat sampah
71		Tenggarong Seberang	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	-	Usulan ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan Desa Mulawarman untuk tahun 2023 untuk penanganan sampah sudah di fasilitasi pembangunan bank sampah tinggal peningkatan fasilitasi sarana prasarana pengelolaannya (penanganan sampah)
72		Kota Bangun	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	-	Usulan Diproses : Kegiatan 2024 akan difasilitasi di desa pela
73		Samboja	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan Diproses : pengadaan roda tiga tahun 2024 difasilitasi di Kecamatan Samboja sebanyak 3 unit, pickup dan dump truck masing-masing sebanyak 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024
74		Muara Muntai	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas pengadaan roda tiga 2021 difasilitasi di Kecamatan Muara Muntai sebanyak 2 unit, dump truck tahun 2022 sebanyak 1 unit dan 4 unit diusulan tambahan pagu perubahan tahun 2023, pickup 1 unit melalui usulan tambahan pagu tahun 2024
75		Tenggarong Seberang	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Kamus Usulan Desa Mulawarman untuk tahun 2023 untuk penanganan sampah sudah di fasilitasi pembangunan bank sampah tinggal peningkatan fasilitasi sarana prasarana pengelolaannya (penanganan sampah)
76		Tenggarong	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan' untuk pengadaan roda tiga bank sampah sukses sejati kel. Panji sudah pernah dilaksanakan tahun 2019
77		Muara Badak	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	-	Usulan Di Tolak : Desa Badak baru untuk tahun 2024 belum Masuk prioritas pembangunann TPS3R dengan dasar pertimbangan bahwa desa badak baru untuk pengelolaan sampah dalam hal penanganan sampah masih tertangani dalam pengangkutan sampah dengan pertimbangan akses jalan mendukung dan lokasi TPA Open Dumping di desa bAtu-batu memenuhi kretria penanganan
78		Tenggarong	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas dan Kamus Usulan Untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Tenggarong sudah difasilitasi dan ditangani operasionalnya oleh Dinas Perkim
79		Muara Badak	Pencacah Sampah Organik	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas Desa Badak Baru untuk tahun 2024 belum Masuk prioritas pengadaan mesin cacah sampah organik
80		Kota Bangun	Pencacah Sampah Organik	-	Usulan Ditolak : Tidak Sesuai Prioritas Desa Kota Bangun Ulu untuk tahun 2024 belum Masuk prioritas pengadaan mesin cacah sampah organik, untuk kecamatan kota bangun masuk dalam pembangunan





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

81	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)/ Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota/Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Sanga Sanga	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh) tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acacia crassiparva, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kalandra)	-	Usulan Dikembalikan : Tidak ditemukan informasi terkait hal-hal sebagai berikut: 1. Memastikan jumlah Luasan dan kawasannya (jika kawasan Hutan (Tolak), APL (dipertimbangkan)) 2. Memastikan Status Lahan (Perorangan/kelompok, Desa) 3. Memastikan Perolehan Lahannya 4. Agar diperjelas terkait masalahnya
82		Kenohan	Penanaman Pohon/Penghijauan Untuk Pelindung Kampung	-	Usulan Dikembalikan : Tidak ditemukan informasi terkait hal-hal sebagai berikut: 1. Memastikan jumlah Luasan dan kawasannya (jika kawasan Hutan (Tolak), APL (dipertimbangkan)) 2. Memastikan Status Lahan (Perorangan/kelompok, Desa) 3. Memastikan Perolehan Lahannya 4. Agar diperjelas terkait masalahnya
83		Muara Wis	Penanaman Pohon/Penghijauan Untuk Pelindung Kampung	-	Usulan Dikembalikan : untuk dilengkapi terkait : 1. Memastikan Status Lahan 2. Memastikan Sumber Pakan Kelulut 3. Memastikan Naungan/Pelindung/Vegetasi
84		Muara Wis	Penanaman Pohon/Penghijauan Untuk Pelindung Kampung	-	Usulan Dikembalikan : untuk dilengkapi terkait : 1. Memastikan Status Lahan 2. Memastikan Sumber Pakan Kelulut 3. Memastikan Naungan/Pelindung/Vegetasi
85		Muara Badak	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh) tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acacia crassiparva, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kalandra)	-	Usulan Dikembalikan : untuk dilengkapi terkait : 1. Memastikan jumlah Luasan 2. Memastikan Status Lahan (Perorangan/kelompok, Desa)
86		Kota Bangun	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh) tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acacia crassiparva, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kalandra)	-	Usulan Dikembalikan : Tidak ditemukan informasi terkait hal-hal sebagai berikut : 1. Memastikan jumlah Luasan 2. Memastikan Status Lahan (Perorangan/kelompok, Desa), sertakan SK Kelompoknya 3. Memastikan Perolehan Lahannya (legalitas lahannya) 4. Acacia Crassiparva tidak di anjurkan karena serbuk bunganya bisa mengganggu pernapasan 5. Agar diperjelas terkait masalahnya terutama pada kelompok Tani Sayur 6. Agar memastikan Jenis tanaman (jangan terlalu banyak jenisnya)
87		Tenggarong	Pengadaan Madu Kelulut (Kelenceng)	-	Usulan Dikembalikan : Tidak ditemukannya informasi terkait hal-hal sebagai berikut : 1. Memastikan Status Lahan 2. Memastikan Sumber Pakan Kelulut 3. Memastikan Naungan/Pelindung/Vegetasi 4. Permohonan dalam bentuk kelompok masyarakat bukan permohonan pribadi dan SK harap di sertakan
88		Loa Janan	Pengadaan Madu Kelulut (Kelenceng)	-	Usulan Dikembalikan : untuk dilengkapi terkait : 1. Memastikan Status Lahan 2. Memastikan Sumber Pakan Kelulut 3. Memastikan Naungan/Pelindung/Vegetasi
89		Muara Badak	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh) tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acacia crassiparva, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kalandra)	-	Usulan Dikembalikan : untuk dilengkapi terkait : 1. Memastikan Status Lahan 2. Memastikan Sumber Pakan Kelulut 3. Memastikan Naungan/Pelindung/Vegetasi
90		Tenggarong	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh) tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acacia crassiparva, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kalandra)	-	Usulan Dikembalikan : untuk dilengkapi terkait : 1. Memastikan Status Lahan 2. Memastikan Sumber Pakan Kelulut 3. Memastikan Naungan/Pelindung/Vegetasi 4. Permohonan dalam bentuk kelompok masyarakat bukan permohonan pribadi, dan sertakan SK Kelompoknya 5. Agar diperjelas terkait masalahnya





BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, PPROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pusat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Adapun arah pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, yaitu :

- Memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor, melalui langkah-langkah penataan regulasi dan dukungan iklim usaha, serta penguatan Tata kelola untuk kepastian hukum;
- Pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, TORA dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui Rehabilitasi DAS, perlindungan dan pengawasan kawasan hutan, pengendalian pencemaran, pengelolaan dampak, penegakan hukum,





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut;
- Pembangunan infrastruktur lingkungan dalam mendukung Program prioritas nasional (pengentasan kemiskinan, pengembangan ekowisata);
- Penguatan pendidikan vokasional dan penguatan Program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.

Tujuan dan peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan diraih melalui perumusan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
- b. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan tidak bertolak belakang dengan Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023	
Tujuan : Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan	
Arah Kebijakan	Strategi
1. Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat	a. Perwujudan struktur ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi; b. Perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang berwawasan lingkungan; c. Pengembangan kawasan strategis industri turunan migas dan batubara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing dan investasi d. Membatasi izin pembukaan kawasan eksplorasi baru dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting
2. Pengembangan sector unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sector pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energy wilayah dan nasional	a. Perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sector pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah; b. Perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan sector pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi; c. Pengembangan kawasan strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah; dan d. Pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energy terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energy wilayah dan nasional
3. Perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau	a. Penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang; b. Penguatan prinsip kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah Heart of Borneo (HoB); dan c. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau
4. Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi	a. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat khususnya pada wilayah yang belum dan/atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis; b. Pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; c. Pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan social budaya masyarakat; dan d. Pengembangan keterkaitan pusat kegiatan di kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI
5. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, social dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan	a. Pengendalian pembangunan melalui upaya tindak antisipatif dan kuratif yang konsisten dalam pengelolaan kegiatan budidaya yang berpotensi dan/atau telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan; b. Peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana; c. Penetapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik, kesesuaian dan daya dukung lingkungan yang turut mempertimbangkan produktivitas ekonomi dan kepentingan social budaya; dan d. Peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan pada pusat kegiatan di wilayah perbatasan negara melalui penetapan zona penyangga yang berfungsi untuk pengamanan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara selektif.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pernyataan untuk mendukung visi dan misi Bupati, yaitu “Terwujudnya Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia. Pada misi ke 5 yaitu : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

Tujuan : “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Berdasarkan tujuan di atas maka disusunlah sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel TC.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,82	73.14	73.47	73.81	74.15	74.51	74.51
2		Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2EQ	18.212	18.640	19.085	19.531	19.976	20.394	20.394
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57.22	57.32	57.42	57.52	57.62	57.72	57.72
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88.68	88.78	88.89	88.89	89.09	89.19	89.19
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	70.26	71.38	72.49	73.89	74.88	76.20	76.20





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PPP PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan kegiatan tahun 2024

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabuptaen Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 akan melaksanakan 12 (Dua belas) Program dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan, dalam rancangan awal Rencana Kerja (Renja 2022) ini kegiatan dilakukan dalam dua urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan. Adapun Program dan kegiatan yang dimaksud

Disesuaikan dengan Permendagri 90 dan lampiran 050. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 pelaksanaan kegaitan tersebar di 18 Kecamatan dan 46 kelurahan . keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rencana program kegiatan, lokasi, pagu anggaran kebutuhan dan sumber pendanaan sebagaimana berikut :





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TC 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA										
OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana	Catatan Penting			
1	6	7	8	9	10		11	12	13	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,9	Nilai	18.628.665.432		Sesuai Dengan Target Awal Perencanaan Renstra, Penambahan Pagu Program dikarenakan adanya penambahan pada Sub Kegiatan	63.56	14.605.680.979
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daearh	8	Dokumen	277.380.000		Perubahan Target Kegiatan berkurang menyesuaikan dokumen yang dibuat	11	358.650.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	157.380.000	APBD	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan penambahan untuk perubahan Renstra OPD	2	72.550.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	120.000.000	APBD	Pengurangan pagu disesuaikan dengan Evaluasi tahun sebelumnya, selisih anggaran ditambahkan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Jasa Komuikasi Sumber Daya Air dan Listrik	5	286.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Laporan	11.207.137.962		Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Triwulan dan Prognosis	12	11.797.031.257
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104	Orang/Bulan	11.002.137.962	APBD	Disesuaikan dengan pagu Gaji tahun 2023, Proses Rekon Gaji dilakukan di pertengahan tahun 2023	1.260	11.592.031.257
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	Laporan	205.000.000	APBD	Pagu rancangan awal dan analisis kebutuhan tidak berubah, dikarenakan batasan pagu pembayaran honorarium masih berada ada Range yang sama	16	205.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	Laporan	48.880.000		Laporan Semester 1 dan Laporan Semester 2	2	48.900.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	48.880.000	APBD	Laporan rekonsiliasi adalah kertas kerja laporan triwulan, semester dan Tahunan, tidak ada perubahan dengan rancangan awal	7	48.900.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	785.010.000		Dokumen yang dihasilkan adalah dokumen analisis kepegawaian, kenaikan pangkat, dan Sasaran Kinerja Pegawai	3	50.550.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	326	Stell	334.460.000	APBD	Pengadaan pakain Dinas Waskat dan Baju Putih, Pengadaan baju terakhir dilakukan di tahun 2018		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	50.550.000	APBD	Dokumen yang dihasilkan adalah dokumen analisis kepegawaian, kenaikan pangkat	2	50.550.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	400.000.000	APBD	Tindak lanjut dari perjanjian kinerja Esselon II butir ke 14 "Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;"		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Dokumen	1.416.000.000		Kenaikan target capaian kinerja mengikuti penambahan pagu dan tambahan sub kegiatan	1	429.180.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	150.000.000	APBD	Bertambahnya beban kerja menjadikan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Alat Tulis Kantor semakin meningkat	35	81.909.645
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	APBD	Pengadaan Gelas, Teko, Dispenser, piring untuk fasilitas kegiatan rapat dalam rangka pembatasan penggunaan sampah kertas dan plastik	528	3.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	242	Paket	28.000.000	APBD	Pengurangan pagu disesuaikan hasil evaluasi, dan target adalah penjumlahan dari target Ranwal, menyesuaikan dengan satuan indikator	1.17 2.150 3.80	28.013.258
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5003	Paket	8.000.000	APBD	kebutuhan tahun 2024 masih sesuai dengan Rancangan awal, tidak ada perubahan target adalah penjumlahan dari target Ranwal, menyesuaikan dengan satuan indikator	1.3 2 5.000	8.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-				
Penyediaan Bahan/Material	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	100.000.000	APBD	Untuk Mendanai Kegiatan Pameran Merah Putih, Pameran Erau, Pameran Pelaksanaan Lingkungan Tingkat Kabupaten dan Nasional	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	Laporan	500.000.000	APBD	Hasil Evaluasi Anggaran tahun 2022 ada beberapa perjalanan tidak dapat di SPJ kan karena kekurangan pagu dan adanya penambahan-penambahan pekerjaan yg diperlukan kordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat	85	308.257.097
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	250.000.000	APBD	Sesuai Intruksi Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-820/DIARPUS/J45.1/02/2020 untuk menganggarkan terkait dengan kearsipan, tahun 2022 tidak ada penganggaran dan nilai kearsipan DLHK masih di kategori "C kurang"	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	350.000.000	APBD	Pengembangan Website Perangkat Daerah dengan menambah Fitur update data dan pembuatan Aplikasi Pembayaran pengujian Sample pada UPTD Laboratorium	-	-





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	914.822.950		Penambahan Kegiatan untuk menunjang beberapa kebutuhan mendesak terkait pengadaan Barang Milik Daerah		
Pengadaan Alat Besar	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	unit	-	APBD	Pengadaan Crane Menunjang tupoksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk penebangan pohon rawan tumbang, dimana sampai saat ini belum ada pemindahan aset dari Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-
Pengadaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	600.000.000	APBD	Kondisi Meja Kerja, Kursi yang rusak berat dan bertambahnya jumlah ASN yang tidak sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	274.822.950	APBD	Pengadaan AC, Televisi dan video conference, sound system (sesuai dengan identifikasi barang rusak berat)	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	40.000.000	APBD	Sesuai dengan telaahan stah kepada Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-36/DLHK/SET-1/640/01/2023 tentang Permohonan Pembangunan Gedung Baru Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	2.233.434.520		Tidak ada perubahan Target waktu penyediaan jasa, tetap dilaksanakan satu tahun dari Januari sd Desember 2023	12	1.797.039.672
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	290.052.000	APBD	Adanya kenaikan tarif dasar listrik dan penambahan pemakaian untuk suplay listrik di bangunan DAK ONLIMO di Kenohan dan Muara Muntai yang tidak menambah jumlah laporan yang harus disusun selama 1 tahun pelaksanaan	12,00	252.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.943.382.520	APBD	Penambahan 5 orang tenaga Analis Laboratorium jenjang pendidikan SI dan Belanja Pihak Ketiga untuk Cleaning Service, untuk target adalah target maksimal laporan mengikuti 1 tahun (12 Bulan) Pelaksanaan	12	1.545.039.672





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80	Persen	1.746.000.000		Kenaikan target pemeliharaan dikarenakan jumlah unit yang diperlihar mengalami kenaikan	66.50	124.330.050
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	275.000.000	APBD	Disesuaikan dengan Pagu pada DPA 2023 dan terdapat kenaikan biaya Sewa untuk Kendaraan Dinas Eselon II	1	124.330.050
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	1.136.000.000	APBD	Penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional sebanyak 5 unit karena 2 kendaraan dinas operasional dalam kondisi Rusak	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	unit	35.000.000	APBD	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan seperti AC, Komputer dan Printer	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1	Unit	300.000.000	APBD	Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	-	-
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	Persen	960.000.000		Target Sesuai dengan Rancangan Awal dengan mempertimbangkan kemampuan menyelesaikan Dokumen Perencanaan Lingkungan dari Sisi Proses Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	100	400.000.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Tersusunnya RPPLH	2	Dokumen	400.000.000		Penyesuaian Target mengikuti target dokumen yang dapat di selesaikan	4	235.000.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2	Dokumen	400.000.000	APBD	1. Jumlah Pagu antara Ranwal dan Hasil analisis kebutuhan tidak mengalami perubahan, namun target berubah dari 4 Dokumen menjadi 2 Dokumen (Dokumen DIKPLHD dan Dokumen IKLH) pengurangan target ini dikarenakan dua dokumen lainnya (Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung dan Value Ekonomi belum dapat diteruskan prosesnya karena tahapan verifikasi provinsi belum selesai 2. Ada Kenaikan Standar Tenaga Ahli yang digunakan sehingga berpengaruh pagu yang ada dialihkan untuk hal tersebut	2	235.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Terselenggaranya KLHS	1	Dokumen	560.000.000		Penyesuaian Target sesuai dengan Jadwal dan Tahapan penyusunan Dokumen KLHS	1	165.000.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	560.000.000	APBD	pada perubahan 2023 akan dianggarkan pembiayaan Penyusunan KLHS RPJMD Perubahan, jika dianggarkan pada perubahan 2023 tahapan pelaksanaan KLHS RPJMD tidak bisa selesai di 2023, sehingga tahapan selanjutnya akan dianggarkan di 2024	1	165.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200.000	Pohon	3.354.920.000		Program Dedikasi Dunia Usaha Ramah Lingkungan dan Program Pencapaian Visi Misi Tujuan RPJMD dan Renstra PD	200.000	2.425.000.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4	Dokumen	2.446.920.000		Merupakan kegiatan pendukung capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra OPD	4	1.631.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Dokumen	643.920.000	APBD	1. Program Penunjang Tujuan RPJMD dan Sasaran Renstra 2. Penambahan untuk dana pendamping DAK Fisik di Kenohan dan Muara Muntai untuk Honorarium Operator Onlimo dan biaya pemeliharaan bangunan dan Alat ONLIMO	2	425.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	365.000.000	APBD	Program Penunjang pencapaian Target, Tujuan Visi Misi RPJMD urusan Lingkungan Hidup	1	370.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	Dokumen	1.438.000.000	APBD	Penambahan untuk pengadaan peralatan uji laboratorium untuk penambahan parameter dan peningkatan kapasitas tenaga analis laboratorium	1	836.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	laporan	122.000.000		Penambahan Target menyesuaikan dengan Laporan pada Sub Kegiatan	1	193.000.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	Laporan	45.000.000	APBD	Hasil Analisis kebutuhan sesuai dengan Rencana awal berupa penyampaian informasi pencemaran melalui media elektronik dan media non elektronik	1	40.000.000
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	25	Lokasi	77.000.000	APBD	Tidak ada perubahan target maupun pagu Ranwal dan Hasil analisis, jumlah lokasi menyesuaikan dengan rata-rata lokasi pencemaran per tahunnya	25	78.000.000
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-		Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tumpang tindih dengan kegiatan lain	50	75.000.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3	Dokumen	786.000.000		Penambahan Target menyesuaikan dengan Laporan pada Sub Kegiatan	1	601.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1	Dokumen	300.000.000	APBD	Pengurangan dilakukan sebagaimana hasil Evaluasi tahun ini dengan melihat kondisi sumber pencemar	1	100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan remediasi	0	-	-	-	-	1	100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	Dokumen	321.000.000	APBD	Kegiatan ini merupakan program Dedikasi Dunia Usaha Ramah Lingkungan, dan juga untuk memfasilitasi rehabilitasi lingkungan	1	231.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Sungai Magkurawang, dan sungai tenggarong	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	Dokumen	165.000.000	APBD	Anggaran digunakan untuk pembersihan daerah sempadan sungai dengan dua titik Lokasi akibat Gulma, dan pohon tumbang	1	170.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	20	Persen	2.275.000.000		Target pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Sebesar 20 % adalah target RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api)	20	2.220.000.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten Kota	0	Dokumen	2.275.000.000		Perubahan target pemeliharaan menyesuaikan dengan rencana penanaman pada tahun 2023	24.19	2.220.000.000
		Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaragaman hayati	80	Persen					
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Muara Kaman (Desa Bunga Jadi) , Tenggarong Seberang (Desa Loa Raya dan Desa Bangun Rejo)	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	26	Hektar	580.000.000	APBD	Perubahan Lokasi dikarenakan hanya dua lokasi ini yang dapat mendukung program, sedang kan lokasi lainn (loa janan dan Samboja, Sanga-sanga) terkait dengan IKN, pada Tahun 2023 dilakukan penanaman dan 2024 untuk pemeliharaan	13	585.000.000
pengelolaan kebun raya	Desa Jembayan Tengah Loa Kulu	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Hektar	635.000.000	APBD	Lokasi adalah Hibah dari PT. Mega Prima Persada (MPP) di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu	2	400.000.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tenggarong, Tenggarong Seberang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	10	Hektar	1.060.000.000	APBD	Analisis kebutuhan sesuai dengan rencana awal untuk pemeliharaan Taman Kota, Penebangan Pohon rawan Tumbang, Pemeliharaan Taman median jalur Samarinda Tenggarong dan untuk fasilitas Sarana dan Prasaran Kebersihan Petugas Pertamanan	25	820.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keekaragaman hayati	-	-	-	-	-	375	175.000.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana keekaragaman hayati yang dikelola	-	-	-	-	-	15	240.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian timbul limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	4	Dokumen	375.000.000		Target disesuaikan dengan rancangan awal	3	175.000.000
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pelaku usaha	50	Pelaku usaha	75.000.000		Target Pelaku Usaha Tidak berubah mengikuti Pelaku Usaha yang Teregister	50	100.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	50	25.000.000
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50	Laporan	75.000.000	APBD	Berdasarkan hasil Evaluasi Tahun sebelumnya dan melihat jenis dan jumlah pelaku usaha tidak ada perbedaan dari rancangan awal	50	75.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	50	Pelaku usaha	300.000.000		Target Pelaku Usaha Tidak berubah mengikuti Pelaku Usaha yang Teregister	50	75.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2	Dokumen	300.000.000	APBD	Penambahan Pagu digunakan untuk penyusunan Dokumen Kajian Timbunan Limbah B3 dan pelaksanaan agenda seminar penyimpanan limbah B3 medis pada Fasilitas Kesehatan sesuai PP No 56 Tahun 2015	40	75.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,32	Persen	790.000.000		Target disesuaikan dengan rancangan awal menyesuaikan dengan Tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan hidup (RPPLH) yang dimiliki	19,32	600.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	25	Persen	790.000.000		Penambahan target mengikuti penambahan jumlah pengawasan yang dilakukan	20	600.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120	Dokumen	102.000.000	APBD	hasil analisis kebutuhan sesuai dengan rancangan awal Rensta, tidak ada perubahan target dan pagu untuk membiayai proses fasilitasi pemenuhan pemberian Rekomendasi ataupun izin lingkungan	120	105.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9	Orang	250.000.000	APBD	Penambahan Pagu dilakukan dalam rangka peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH) sebagai salah satu syarat Perpanjangan izin pengawasan	9	105.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	129	Laporan	350.000.000	APBD	1. Program Dedikasi Dunia Usaha Ramah Lingkungan 2. Penambahan Pagu melihat evaluasi tahun sebelumnya jumlah pelaku usaha yang diawasi meningkat menjadi 129 pelaku usaha	120	315.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	20	Dokumen	188.000.000	APBD	Hasil analisis kebutuhan sesuai dengan rancangan awal Renstra dan Tidak ada perubahan target ataupun pagu anggaran	20	75.000.000
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenohan, Kota Bangun	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	75	Persen	75.000.000		Target sesuai dengan Rancangan Awal dengan mempertimbangkan kemampuan menyelesaikan identifikasi sampai ke tahap penetapan dan waktu yang diperlukan selama satu tahun	75.00	75.000.000
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenohan, Kota Bangun	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	75	Persen	40.000.000		Target Tahun 2024 adalah penambahan jumlah MHA yang ditetapkan sebanyak 2MHA dan Identifikasi calon MHA baru	75.00	75.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenohan, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	6	Dokumen	40.000.000	APBD	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu	5	40.000.000
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenohan, Kota Bangun	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	70	Persen	35.000.000		Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu	70	35.000.000
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenohan, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	35.000.000	APBD	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu	1	35.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	97	Persen	100.000.000		Sesuai dengan target rencana awal, nilai yang ditargetkan adalah nilai maksimal	98.00	200.000.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	40	Laporan	100.000.000		Perubahan target menyesuaikan dengan target laporan pada sub kegiatan yang dapat dilaksanakan	50	200.000.000
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	20	Dokumen	100.000.000	APBD	Hasil Analisis Kebutuhan sesuai dengan Rencana Awal, target yang ditetapkan disesuaikan dengan rata-rata pengaduan yang teregistrasi dan yang dapat ditangani dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan selama satu tahun	20	100.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	35	Lembaga	240.000.000		Susuai dengan target rencana awal, nilai yang ditargetkan adalah nilai maksimal yang dapat ditangani pertama dengan memperhatikan SDM yang dimiliki	35	240.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	35	kali	240.000.000		Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu	35	240.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2	Lembaga	80.000.000	APBD	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu	2	80.000.000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	30	Dokumen	80.000.000	APBD	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu, pendampingan dilakukan ke 30 Sekolah Adiwiyata yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara	30	80.000.000
Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	350	Orang	80.000.000	APBD	Hasil analisis kebutuhan dan Rencana Awal Renstra Sesuai tidak ada perubahan target maupun pagu	325	80.000.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	5	Desa/Kelurahan	650.000.000		Sesuai dengan Rancangan Awal	3	100.000.000
		2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	128	Penghargaan					
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	2	Jenis	650.000.000		Program Dedikasi Desa Ramah Lingkungan, dengan dua Jenis Penghargaan yang diberikan adalah penghargaan desa ramah lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	2	100.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	111	Entitas	650.000.000	APBD	Program Dedikasi Desa Ramah Lingkungan Penambahan dialokasikan untuk membiayai tim pembina dan penilai Desa Ramah lingkungan diluar Tim yang ada di DLHK (Perjalanan Dinas dan Honorarium) selain itu sub kegiatan ini menaungi penilaian untuk Adiwiyata, dan Kalpataru	124	100.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun 2. Timbulan sampah	1 97.64	Lokasi Persen	85.890.081.808		Untuk target TPA dan Timbulan Sampah tidak mengalami perubahan sebagaimana yang tertera pada Dokumen Jakstrada, penambahan unit sarana prasarana adalah komponen pendukung timbulan sampah yang dapat ditangani	1 99.52	12.160.000.000
Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani	72	Persen	85.890.081.808		Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan	70.00	
		2. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	12,73	Persen				28.30	11.800.000.000
		3. Persentase cakupan area pelayanan	61,11	Persen				72.22	
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Sukarama, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3	Dokumen	380.000.000	APBD	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan yang diperuntukkan untuk penyusunan regulasi terkait pengelolaan sampah (Penyusunan Dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah dan Penyusunan Peraturan Bupati terkait kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Sampah)	3	280.000.000
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kecamatan Tenggarong, Muara Wis, Muara Muntai, Muara Kaman, Sanga-Sanga	Jumlah sampah yang terdaur ulang	1	Laporan	14.300.000.000	APBD	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan Pembangunan TPS3R dan Sarana Pendukungnya , pembangunan TPS3R belum ada dan ini sifatnya wajib untuk mendukung Adipura Kabupaten	1	720.000.000
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	60865,6032	Ton	27.749.272.000	APBD	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan Digunakan untuk peningkatan Kapasitas TPA (Tanah Timbunan) dan Pemeliharaan Unit aRmada Sampah	60. 529.99	1.950.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Bangun, Tenggarong, Kenohan, Muara Wis,	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5	Kelompok	400.000.000	APBD	Pengurangan Dilakukan sebagaimana hasil evaluasi dan anggaran di alihkan ke sub kegiatan pengurangan sampah	5	880.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Marang Kayu, Kecamatan Sebulu, Kenohan, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Loa Janan, Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	7	Dokumen	3.400.000.000	APBD	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan Dukungan Penyusunan Dokumen DED, UKL UPL, Amdal Pembangunan TPA	2	900.000.000
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	Dokumen	200.000.000	APBD	Penambahan pagu digunakan untuk kegiatan-kegiatan terkait kerjasama penanganan sampah	2	100.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	18 Kecamatan di Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan	5952	Unit	39.460.809.808	APBD	Program Dedikasi Kukar Peduli Lingkungan	19	6.970.000.000
Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan	Kutai Kartanegara	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang						66,67	75.000.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kutai Kartanegara	Jumlah pelayanan yang dilakukan	-	-	-	-	-	10,00	75.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kutai Kartanegara	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	82,00	285.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	-	-	-	-	-	15,00	55.000.000
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kutai Kartanegara	Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga dalam pengelolaan sampah melaksanakan penilaian kinerja	-	-	-	-	-	50,00	155.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kutai Kartanegara	Jumlah monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	-	-	-	-	-	25,00	75.000.000





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Muara Kamam, Muara Siran	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	16,67	Persen	150.000.000		Persentase Penyelesaian perencanaan disesuaikan dengan target awal	66.67	300.000.000
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Muara Kamam, Muara Siran	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dokumen	150.000.000		Tidak ada perubahan Target Dokumen, Dokumen yang di hasilkan adalah dokumen Tahapan rencana pengelolaan dan Penetapan Taharu	1	300.000.000
Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Muara Kamam, Muara Siran	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1	Dokumen	150.000.000		Sebagaimana hasil evaluasi tahun sebelumnya bahwa kegiatan Tahura masih dalam tahap/proses penetapan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anggaran yang ada digunakan untuk memfasilitasi tim penataan blok Tahura dengan catatan Penetapan Tahura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2023 dapat diselesaikan	-	-
					113.588.667.240				33.500.680.979,00





BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja 2024 (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan Dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat tentang Program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal Renja 2024. Penyusunan Renja dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Sehingga dilakukan penyesuaian antara tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, partisipasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran Dewan.

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di Internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personel di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan lebih optimal.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan diutamakan dalam mendukung Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan tutupan lahan. Selain itu pemenuhan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang melekat pada masing-masing Program.



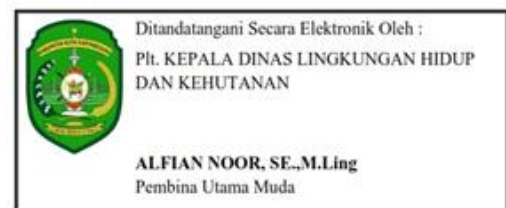


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran. Terhadap Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas dan juga tetap berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Tenggarong, 25 Juli 2023





KEMENTRIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN